

STUDI KASUS PENGELOLAAN APBD DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN DELI SERDANG

Inez Bita Nurisky

Universitas Negeri Medan

e-mail: inezbirsky@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur periode 2021 hingga 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, di mana data dikumpulkan dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, dan perwakilan masyarakat, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan APBD, dan publikasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya surplus anggaran pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp9,72 miliar dan Rp26,62 miliar. Namun, pada tahun 2023 terjadi defisit signifikan sebesar Rp50,42 miliar akibat penurunan realisasi pendapatan yang hanya mencapai Rp1.458,65 miliar dari target Rp4.117,86 miliar. Tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan fiskal, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama dalam realisasi belanja infrastruktur. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, serta perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Kata Kunci: APBD, Pengelolaan Infrastruktur, Alokasi Anggaran.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah, berfungsi sebagai peta jalan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya keuangan pemerintah daerah. APBD tidak hanya mencerminkan kebijakan publik, tetapi juga menggambarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan APBD yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tercermin dari peningkatan pendapatan daerah yang mencolok. Namun, tantangan tetap ada dalam pengelolaan APBD, terutama terkait pengalokasian anggaran yang tepat dan realisasi belanja yang sesuai dengan rencana. Pada tahun 2021, misalnya, APBD Kabupaten Deli Serdang mengalami surplus, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dengan baik. Namun, situasi berbalik pada tahun 2023 ketika terjadi penurunan drastis dalam realisasi pendapatan, yang memicu defisit anggaran. Fenomena ini menandakan adanya persoalan serius dalam implementasi anggaran yang perlu dievaluasi secara mendalam agar tidak menghambat perkembangan daerah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur yang baik, aksesibilitas terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat ditingkatkan, sehingga berdampak langsung pada

kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, realisasi belanja sering kali terhambat oleh berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, koordinasi yang kurang optimal antar lembaga, serta dampak perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur menjadi isu sentral yang harus dihadapi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur. Misalnya, penelitian oleh Nasution dan Suwarno (2020) mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat desa. Selain itu, penelitian oleh Panggabean et al. (2020) menekankan pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan dana belanja daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Penelitian lain oleh Christiawan et al. (2023) juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya berdampak positif pada efektivitas pengelolaan anggaran.

Analisis mendalam terhadap pengelolaan APBD dan realisasi belanja infrastruktur sangat penting untuk memahami dinamika yang ada serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan APBD Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada realisasi belanja infrastruktur dan tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari wawancara dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, dan perwakilan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang holistik mengenai pengelolaan anggaran dan dampaknya.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam era informasi saat ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program-program pemerintah menjadi semakin krusial. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan tetapi juga subjek yang berperan dalam menentukan arah pembangunan.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan APBD Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2021 hingga 2023, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam realisasi belanja infrastruktur dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan tentang pengelolaan APBD di Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD serta memperkuat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi belanja infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan ini dipilih karena

memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pengelolaan anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat. Wawancara ini dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait pengelolaan APBD, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan wawancara bersifat terbuka untuk memberikan kebebasan kepada informan dalam menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka.

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan APBD, serta publikasi yang relevan dari Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi anggaran dari tahun ke tahun, serta informasi mengenai proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan. Analisis terhadap data sekunder dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam pengelolaan keuangan daerah.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan pengelolaan APBD dan infrastruktur. Peneliti melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas informasi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang ada. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik pengelolaan APBD di Kabupaten Deli Serdang, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBD Kabupaten Deli Serdang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Deli Serdang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan pendapatan daerah yang terus bertumbuh, pengelolaan yang baik menjadi kunci untuk memastikan alokasi yang efektif dan efisien. Pada tahun 2021, anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3.993,71 miliar, dengan realisasi mencapai Rp4.184,60 miliar, menunjukkan surplus yang menggembirakan sebesar Rp9,72 miliar. Keberhasilan ini mencerminkan potensi pengelolaan keuangan daerah yang baik dan menciptakan ruang untuk investasi lebih lanjut dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Memasuki tahun 2022, meskipun anggaran pendapatan sedikit menurun menjadi Rp3.944,67 miliar, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp4.107,55 miliar. Surplus yang meningkat menjadi Rp26,62 miliar, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil mulai menunjukkan hasil positif, meskipun tantangan tetap ada. Efektivitas pengelolaan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, situasi pada tahun 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun anggaran pendapatan daerah meningkat menjadi Rp4.117,86 miliar, realisasi pendapatan

hanya mencapai Rp1.458,65 miliar, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp50,42 miliar. Penurunan drastis dalam realisasi ini menandakan adanya tantangan serius dalam implementasi anggaran yang memerlukan perhatian dan evaluasi segera. Beberapa faktor penyebab defisit ini meliputi:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global: Dampak dari krisis ekonomi global, seperti inflasi yang tinggi dan gangguan rantai pasokan, mempengaruhi pendapatan daerah. Penurunan daya beli masyarakat juga berkontribusi terhadap berkurangnya pendapatan pajak.
2. Perubahan Kebijakan Fiskal: Kebijakan fiskal yang diubah atau diperketat oleh pemerintah pusat dapat berdampak langsung pada alokasi dana ke daerah. Hal ini sering kali mengakibatkan berkurangnya dana yang tersedia untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik.
3. Masalah Administrasi dan Koordinasi: Potensi masalah dalam administrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah juga dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai target pendapatan. Proyek yang tertunda atau tidak berjalan sesuai rencana bisa menghambat realisasi anggaran.

Meskipun alokasi untuk infrastruktur pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan, realisasi belanja untuk proyek infrastruktur pada 2023 sangat rendah, yaitu hanya Rp1.344,44 miliar dari target Rp4.168,28 miliar. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan proyek, kurangnya pengawasan, dan kendala teknis di lapangan.

Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang

Infrastruktur merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama di Kabupaten Deli Serdang. Pengembangan infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak hanya berperan dalam meningkatkan konektivitas, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan perkembangan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap pengelolaan APBD serta realisasi belanja infrastruktur menjadi krusial untuk memahami dinamika dan tantangan yang ada.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2021, anggaran pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tercatat sebesar Rp3.993,71 miliar, dengan realisasi mencapai Rp4.184,60 miliar, yang menghasilkan surplus sebesar Rp9,72 miliar. Keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, di mana pemerintah daerah mampu memaksimalkan pendapatan melalui berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi. Pada tahun 2022, meskipun terjadi sedikit penurunan anggaran pendapatan menjadi Rp3.944,67 miliar, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp4.107,55 miliar, menghasilkan surplus yang lebih besar sebesar Rp26,62 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, meskipun tantangan dalam pelaksanaan tetap ada.

Namun, situasi pada tahun 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun anggaran pendapatan daerah meningkat menjadi Rp4.117,86 miliar, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp1.458,65 miliar, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp50,42 miliar. Penurunan drastis dalam realisasi ini menandakan adanya tantangan serius dalam implementasi anggaran, yang memerlukan perhatian dan evaluasi mendalam untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif.

Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Realisasi belanja daerah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp4.168,28 miliar, hanya Rp1.344,44 miliar yang terealisasi. Hal ini

menunjukkan adanya potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal dan menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan anggaran.

Kedua, masalah koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala. Proyek infrastruktur sering melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas teknis, dan sektor swasta. Ketidakselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat mengakibatkan keterlambatan dan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga guna menciptakan sinergi yang efektif dalam pengelolaan proyek infrastruktur.

Perbandingan Data APBD Tahun 2021 - 2023

Analisis data APBD Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2021, total anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3.993,71 miliar. Dengan realisasi pendapatan yang mencapai Rp4.184,60 miliar, daerah ini berhasil mencatat surplus sebesar Rp9,72 miliar. Keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan yang efisien, di mana pemerintah daerah mampu memaksimalkan pendapatan melalui berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan dana perimbangan.

Memasuki tahun 2022, anggaran pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp3.944,67 miliar, namun realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp4.107,55 miliar. Surplus yang dihasilkan meningkat menjadi Rp26,62 miliar, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhasil menstabilkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Ini merupakan indikasi positif bahwa upaya pengelolaan keuangan yang lebih baik mulai memberikan hasil.

Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2023. Meskipun anggaran pendapatan daerah meningkat menjadi Rp4.117,86 miliar, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp1.458,65 miliar, yang mengarah pada defisit sebesar Rp50,42 miliar. Penurunan drastis dalam realisasi ini menandakan adanya tantangan besar dalam implementasi anggaran. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini antara lain ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan fiskal, serta potensi masalah administrasi dan koordinasi di dalam pemerintahan daerah.

Dari sisi belanja daerah, pada tahun 2021, total belanja yang terealisasi adalah Rp4.059,03 miliar, sedangkan pada tahun 2022, realisasi belanja meningkat menjadi Rp4.057,58 miliar. Namun, pada tahun 2023, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp4.168,28 miliar hanya terealisasi Rp1.344,44 miliar. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada rencana yang ambisius untuk pengembangan infrastruktur, pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Deli Serdang dalam konteks pembangunan infrastruktur selama periode 2021 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pengelolaan APBD, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap realisasi belanja infrastruktur.

Dalam analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2021, APBD Kabupaten Deli Serdang mencatatkan pendapatan sebesar Rp3.993,71 miliar dengan realisasi mencapai Rp4.184,60 miliar, menghasilkan surplus sebesar Rp9,72 miliar. Pada tahun 2022, meskipun anggaran pendapatan sedikit menurun menjadi Rp3.944,67 miliar, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp4.107,55 miliar, menghasilkan surplus yang lebih besar, yaitu

Rp26,62 miliar. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2023, di mana anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp4.117,86 miliar, tetapi realisasi pendapatan hanya mencapai Rp1.458,65 miliar, menyebabkan defisit sebesar Rp50,42 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi anggaran yang perlu dievaluasi.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan maupun pembaca umum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk mengkaji penyebab penurunan signifikan dalam realisasi anggaran pada tahun 2023 serta memberikan saran perbaikan yang relevan untuk masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan, D. G., Novandalina, A., & Setiyaningsih, A. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Mediasi. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(1), 93-104.
- Hidayat, R., & Sari, M. (2022). Efisiensi Pengelolaan APBD dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 23-35.
- Lestari, D., & Prasetyo, A. (2021). Tantangan dalam Pengelolaan APBD di Era Digital. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(3), 67-80.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, D. A., & Suwarno. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada APBDes Di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 1-12.
- Nugroho, S. (2022). Evaluasi Pengelolaan APBD untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. *Jurnal Riset Kebijakan Publik*, 14(2), 89-100.
- Panggabean, F. Y., Siregar, O. K., & Nasution, A. A. (2020). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Belanja Daerah Di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(1), 1-12.
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2021). *Laporan Keuangan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021*. Deli Serdang: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2022). *Laporan Keuangan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*. Deli Serdang: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2023). *Laporan Keuangan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023*. Deli Serdang: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Prabowo, H., & Sari, M. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan APBD dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 15-30.
- Sari, R. A., & Rahman, A. (2021). Pengelolaan APBD yang Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 45-60.
- Sartika, Y. (2023). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun tahun 2018-2020). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(1), 189-199.
- Setiawan, B., & Rahardjo, S. (2020). Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 45-58.
- Wibowo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBD: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101-112.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.